

SISTEM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF ABU AL-A'LA AL-MAUDUDY

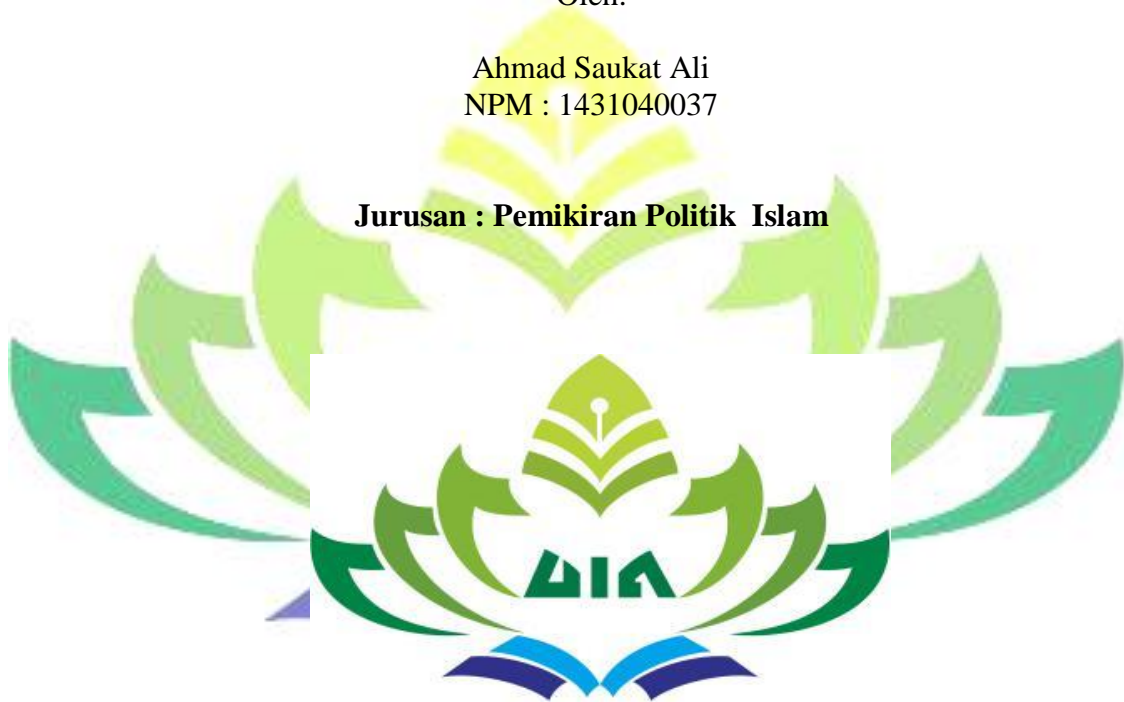
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

Ahmad Saukat Ali
NPM : 1431040037

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

SISTEM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF ABU AL-A'LA AL-MAUDUDY

Oleh :

AHMAD SAUKAT ALI

Sungguhpun pemikiran Abu al-A'la al-Maududy Banyak ahli yang mempertanyakan atau bahkan tidak setuju dengan statemen bahwa Islam merupakan sistem komprehensif, mencakup segala persoalan duniawi dan/ atau ukhrawi yang tercemin dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Akan tetapi dengan konsisten, pendiri *Jama'at-i Islam* ini mencoba merakit dan menjalin seluruh pemikirannya menjadi satu sistem dan tata pikir terpadu. Statemen dasar bahwa Islam merupakan sistem komprehensif bagi kehidupan manusia menjadi pijakan utama yang termuat di dalamnya sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. Baginya, Islam merupakan sebuah sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang berdiri di atas postulat yang jelas dan pasti. Segala kehidupan manusia telah diatur di dalamnya dengan tegas, sehingga kaum muslim tidak perlu berpaling atau bahkan mencari sistem lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Sungguhpun pemikiran al-Maududy sering mendapat kritik keras, akan tetapi kritik itu tidak sedikitpun menggoyahkan kemantapan tata pikirnya yang begitu solid. Dengan argumentasi-argumentasinya yang sistematis, ia mampu tetap bertahan dengan konsep dasar universalitas Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimanakah system politik Islam menurut Abu A'la Al-Maududi? (2) Bagaimana hubungan antara sistem politik Islam Abu A'la Al-Maududi dengan sistem politik modern?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang datanya diperoleh dari hasil membaca dan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti data primer dan data sekunder. Setelah mendapatkan data, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode membaca pada tahap simbolik, yakni membaca yang dilakukan tidak menyeluruh melainkan menangkap isi dari data tersebut, membaca pada tingkat semantik, yakni membaca secara terinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode Holistika, dan Interpretasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa, dalam Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy. seperti Abu Al- A'la Al-Maududy menggagas persoalan utama berhubungan dengan tauhid atau ketuhanan yang di aplikasikan dalam kemauan Tuhan bukan kemauan makhluknya. Islam harus tunduk dan patuh terhadap kedaulatan Tuhan sehingga dapat menjalankan dengan cara yang demokratis. negara/ lembaga eksekutif.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : ALI IMRON
NPM : 1511010220
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN KITAB TUHFATUL
ATHFAL DALAM MENINGKATKAN KEFASIHAN
MEMBACA AL-QURAN DIPONDOK PESANTREN
RAUDHLATUL HUDA AL-ISLAMY SIDOMULYO
PESAWARAN**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Pd
NIP. 1961110919990031003

Pembimbing II

Dr. Runladani Sagala, M.Ag
NIP. 196002081986032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Sa'idy, M. Ag
NIP. 196603101994031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PENERAPAN KITAB TUHFATUL ATHFAL DALAM MENINGKATKAN KEFASIHAN MEMBACA AL-QUR'AN DIPONDOK PESANTREN RAUDHLATUL HUDA AL-ISLAMY SIDOMULYO PESAWARAN.**

Disusun oleh: **ALI IMRON, NPM: 1511010220**, Jurusan: **Pendidikan Agama Islam**. Telah di Munaqosyahkan pada hari/tanggal: **Selasa, 27 Agustus 2019.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. Sa'idy, M.Ag.
Sekretaris : Heru Juabdin Sada, M.Pd.I
Penguji Utama : Dr. H. Amirudin M.Pd.I.
Pembahas Pendamping I : Prof. Dr. H. Saiful Anwar. M.Pd.
Pembahas Pendamping II : Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.
NIP. 196408281988032002

SURAT PERNYATAAN ORISINAL

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Saukat Ali

Npm : 1431040037

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A’la Al-Maududy” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidak sesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya siap menerima segala saksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019

Ahmad Saukat
Ali
NPM
1431040037

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

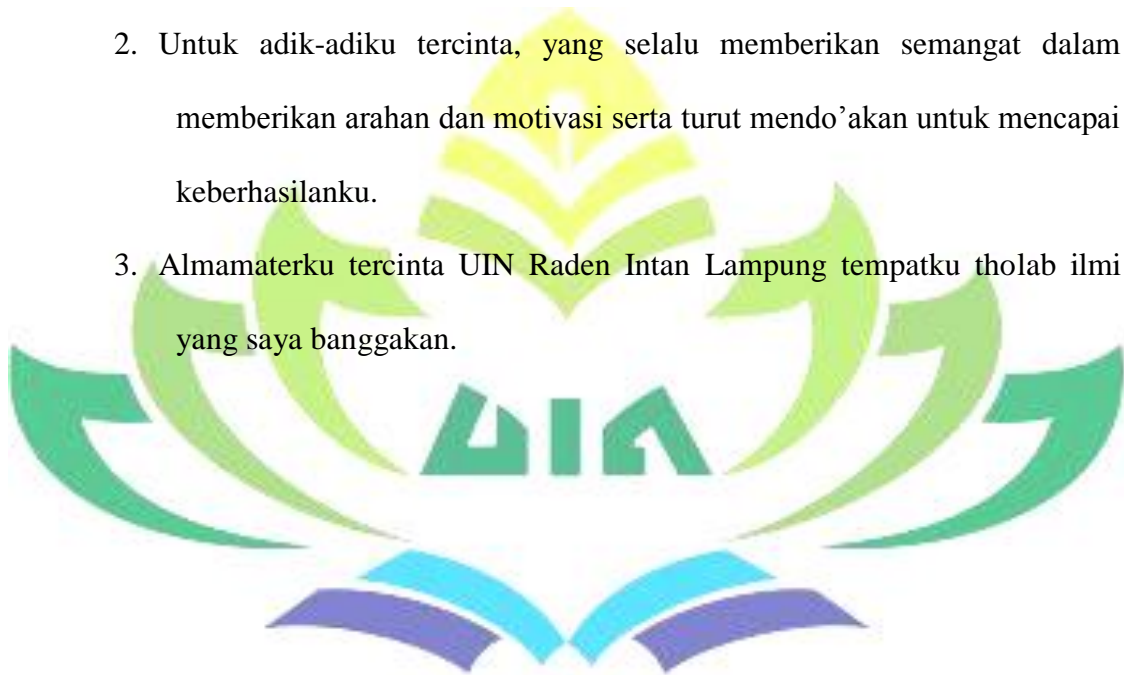
*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu” (QS. An-Nisa:59)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rohmat dan Inayah-Nya, dan shalawat serta salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada jujungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa puji dan segala syukur dan tulus ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Ahmad Bangsawan Ali dan Ibunda Ratna Erlaeni), yang senantiasa membimbing penuh dengan kasih sayang dan kelembutan hati, dan selau mendoakan akan kesuksesan demi keberhasilan dalam mengapai sebuah cita-cita.
2. Untuk adik-adiku tercinta, yang selalu memberikan semangat dalam memberikan arahan dan motivasi serta turut mendo'akan untuk mencapai keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku tholab ilmi yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Saukat Ali. Lahir di Penengahan La'ay tanggal 06 juni 1996 putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Ahmad Bangsawan Ali dan Ibunda Ratna Erlaeni. Pendidikan pertama kali SDN 1 Penengahan La'ay dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan sekolah di MTS NU Krui lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan MAN Krui lulus pada tahun 2014, kemudian tepat pada tahun 2014 meneruskan pendidikan SI di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam. Selama aktif menjadi mahasiswa UIN RIL menjadi anggota PMII Rayon Ushuluddin Dan Studi Agama.



KATA PENGANTAR

Hanyalah Allah jualah yang berhak segala puji, dan hanya Allahlah yang maha Agung dan maha Kaya dengan segala ilmu. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, Rasuluallah SAW. Dan para pendukung-Nya yang mau menyampaikan-Nya ilmu Allah kepada umat yang haus kebenaran serta yang menggali ilmu Allah yang tertera dan tidak tertera. Seperti ayat kaunia dan tanzil.

Alhamdulillah dalam pembuatan skripsi ini tidak ada hambatan atau kendala yang berarti, sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dalam hal ini saya selaku penulis. Dalam pembuatan skripsi ini memiliki kekurangan dalam penyusunan, maka harapan penulis kepada pembaca dapat memberikan kritik dan sarannya. Karya kecil ini tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk tholab ilmi dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Ansori M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Di Prodi Pemikiran Politik Islam.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, dan Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si selaku Sekertaris

Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada pembimbing I, Bapak Dr. H. Nadirsah Hawari, Lc., M.A dan Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, khususnya di Jurusan Pemikiran Politik Islam.
6. Teman-teman angkatan 2014 dan Khususnya sahabat-sahabat, zahrial, tri sektiono, irma, yogi, imam, siddiq, dwi, lia, beni, lista, yusuf, apriansyah dan lain-lain terimakasih atas dukungan dan semangat semuanya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, dan peneliti akhiri dengan memanjatkan do'a semoga Allah berkahi. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019

Ahmad Saukat Ali
NPM 1431040037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINAL	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfa'at Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian	6
H. Tinjauan Pustaka.....	10
BAB II TEORI UMUM POLITIK ISLAM.....	14
A. SISTEM POLITIK ISLAM	
1. Teori Politik Islam	16
2. Tujuan Negara Islam	17
3. Kekhalifahan Dan Hakekat Demokrasi Dalam Politik Islam	21
B. HUBUNGAN POLITIK ISLAM DENGAN ASPEK HUKUM DAN EKONOMI.....	24
1. Politik Dan Hukum.....	24
2. Politik Dan Ekonomi.....	35

BAB III BIOGRAFI ABU AL-A'LA AL-MAUDUDY 44

- A. Riwayat Hidup Abu A'la Al-Maududy.....44
- B. Riwayat Pendidikan Abu A'la Al-Maududy. 44
- C. Karya-karya Abu A'la Al-Maududy.....45

BAB IV SISTEM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF ABU AL-A'LA AL-MAUDUDY 49

- A. Prinsip Teori Politik Islam Menurut Abu A'la Al-Maudud 49
- B. Abu A'la Al-maududy dan Negara Islam 60
- C. Tujuan Negara Islam Menurut Abu Al-A'la Al-Maududy 71
- D. Prinsip Politik Islam 83
- E. Sistem Khilafah Menurut Abu Al-A'la Al-Maududy 85

BAB V PENUTUP 91

- A. Kesimpulan..... 91
- B. Saran-Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini yang terpenting akan dipaparkan atau dijabarkan pokok-pokok bahasan dalam penulisan proposal judul ini yang akan digunakan untuk penulisan skripsi setelah dilaksanakannya seminar skripsi ini berjudul ” *Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A’la Al-Maududy.*”

Sistem politik Islam adalah sistem konstitusional yang dibentuk atas syarat-syarat yang digariskan oleh syariah, yang merupakan sistem kehidupan yang lengkap dan meliputi semua tatanan sosial. Syariah menurut al maududi adalah persoalan yang menyentuh pada aspek ritual-ritual keagamaan, karakter pribadi, moral, kebiasaan-kebiasaan, hubungan keluarga, unsur-unsur sosial dan ekonomi, hak-hak dan kewajiban warga, sistem hukum, hukum perang dan damai serta hubungan internasional.¹ Sistem politik Islam dalam hal ini dikhususkan pada aspek ritual keagamaan atau upacara yang dilakukan oleh berbagai macam agama antara lain Islam, hindu, budha dan lain sebagainya. Dalam aspek ritualitas keagamaan diharapkan tidak mencampur adukan antara keagamaan dan politik dalam arti lain Islam memperbolehkan berpolitik akan tetapi tidak boleh mempolitisasi Islam

Perspektif dapat dimaknai sebagai sudut pandang baik dalam masyarakat multikultural pandangan politik untuk menciptakan suatu perdamaian dalam pemerintahan baik secara umum (berbagai negara), maupun secara khusus negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai aset atau kekayaan dalam berbudaya, berbangsa guna untuk menata suatu tatanan perekonomian yang sedang berkembang

¹Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), h.306.

pada saat ini. Suatu ikatan multikultural satu pandangan dan keinginan politik suatu masyarakat. Dalam hal ini peranan para politikus sangat menentukan keinginan dan cita-cita masyarakat.² Setiap dalam penyelesaian masalah baik secara teori maupun secara praktek hendaknya mengacu kepada sudut pandang para peneliti dalam mencari solusi.

Abu Al-A'la Al-Maududy adalah Sayyid Abul A'la Maududi (Urdu: سید ابو الاعلیٰ مودودی - pengejaan alternatif nama akhir Maududi, dan Mawdudi) (25 September 1903 - 22 September 1979), juga dikenal sebagai Mawlana (Maulana) atau Syeikh Sayyid Abul A'la Mawdudi, adalah jurnalis, teolog, dan filsuf politik Pakistan Sunni, dan mayor pemikir Islam Ortodoks abad ke-20. Dia juga merupakan figur politik di negaranya (Pakistan), di mana didirikan partai Islam Jamaat Al-Islami.³

Setelah dipaparkan dalam penulisan judul diatas maka penulis dapat merangkum dalam pembahasan sistem politik Islam perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy ini, yaitu sistem ritualitas dalam keagamaan dan konstitusional yang dibentuk atas syarat-syarat yang digariskan oleh syariah, yang merupakan sistem kehidupan yang lengkap dan meliputi semua tatanan sosial digagas oleh Abu Al-A'la Al-Maududy.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul di atas dalam “Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy” ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan secara Objektif

- Pengembangan teori kemungkinan yang berkaitan dengan pendekatan pandangan Islam (perspektif Islam).

² M Sidi Ritaudin Dosen Dan Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2015

³Abu Al-A'la Al-Maududy” (on-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Abul_A%27la_Maududi (23 Oktober 2018)

- Sebagai bahan rujukan penelitian yang akan datang

2. Alasan secara Subjektif

- Secara subjektif bahwa dalam penelitian ini penulis menganggap masih urgen untuk melakukan research (penelitian), secara *library research*.

- Pembahasan proposal judul ini sesuai dengan Prodi Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Umat Islam, sebagai bagian integral dari manusia secara general, mau atau tidak, pasti bersentuhan, baik secara pasif maupun aktif, dengan dunia politik dan pemerintahan karena keduanya merupakan bagian yang tak terhindarkan dari hidup dan kehidupan. Terlebih, tidak sedikit ayat al-Quran yang menyinggung masalah ini meskipun pada tataran global dan interpretatif sehingga memunculkan ide-ide tentang politik dan pemerintahan yang beragam di kalangan intelektual muslim.

Salah satu tokoh yang mempunyai perhatian cukup besar terhadap masalah ini adalah seorang pemikir dari sub kontinen India (Pakistan) yang bernama Abu al-A'la al-Maududy, yang lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H./25 September 1903 M. di Aurangabad, sebuah kota terkenal dikesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang bernama Andhra Pradesh di India.⁴

Banyak ahli yang mempertanyakan atau bahkan tidak setuju dengan statemen bahwa Islam merupakan sistem komprehensif, mencakup segala persoalan duniawi dan/ atau ukhrawi yang terceminkan dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Akan tetapi dengan konsisten, pendiri *Jama'at-i Islam* ini mencoba merakit dan menjalin seluruh pemikirannya menjadi satu sistem dan tata pikir terpadu. Statemen dasar

⁴Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1993), h. 238.

bahwa Islam merupakan sistem komprehensif⁵ bagi kehidupan manusia menjadi pijakan utama yang termuat di dalamnya sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. Baginya, Islam merupakan sebuah sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang berdiri di atas postulat yang jelas dan pasti. Segala kehidupan manusia telah diatur di dalamnya dengan tegas, sehingga kaum muslim tidak perlu berpaling atau bahkan mencari sistem lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya.

Sungguhpun pemikiran al-Maududy sering mendapat kritik keras, akan tetapi kritik itu tidak sedikitpun menggoyahkan kemantapan tata pikirnya yang begitu solid.⁶ Dengan argumentasi-argumentasinya yang sistematis, ia mampu tetap bertahan dengan konsep dasar universalitas Islam.

Meskipun, pada tataran aplikatif sulit diwujudkan terlebih dewasa ini yang mengemuka adalah tidak lagi ideologi agama, *an sich*, tapi juga faktor lain baik berupa nasionalisme, partai politik, atau untuk kasus tertentu kesukuan. Kajian terhadap konsepsi politik dan pemerintahan al-Maududy tampaknya cukup urgen bila dilihat dari segi konsep-konsep yang ditawarkan, meskipun terkesan tekstual dengan banyak menggunakan pola pikir deduktif, yang terpolarisasi oleh diktum wahyu Ilahi, tapi pada sisi yang lain realitas sosial yang muncul belakangan juga tersentuh walau dalam porsi yang tidak sama dengan yang disebut sebelumnya.

Pemikiran politik al-maududy bersifat independen tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang sedang terjadi. Realitas politik yang sedang berkembang kala itu bahkan banyak ditentang karena dinilai tidak sejalan dengan misi diturunkannya ajaran Islam. Hal ini terlihat, pada satu sisi, misalnya, ia mengkritik dan melawan kebijakan pemerintahan Pakistan, Negara di mana ia tinggal,

⁵Harun Nasution, *Studi Islamika*, No. 17 Juli 1983, h. 4.

⁶M. Amin Rais, "Kata Pengantar *Khilafah dan Kerajaan*", Dalam Abu Al- A'la Al-Maududy, *al-Khilafah wa al-Mulk* (Bandung : Mizan, 1978), h. 6.

dan menuduh orang-orang yang berkuasa di negara itu gagal mengubah pakistan menjadi negara Islam yang sesungguhnya.

Al-Maududy mengemukakan mengenai sistem politik Islam yang termakna pada bukunya *Al-Khalifah Wa Al-Mulk* itulah pandangan beliau mengenai sistem politik di negaranya bahwa jelas terdapat permasalahan antara realitas politik yang sedang berkembang kala itu.

Sistem politik Islam tentang dalam perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy dianggap masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai penulisan proposal judul yang selanjutnya akan dibahas dalam bentuk skripsi.

Inilah sebagai langkah awal yang dilakukan oleh penulis mengenai pembahasan tentang sistem politik Islam dalam perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan sistem politik Islam dengan politik dan hukum menurut Abu A'la Al-Maududi?
2. Bagaimana hubungan antara sistem politik Islam dengan politik dan ekonomi menurut Abu A'la Al-Maududi?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada korelasi antara sistem politik Islam dengan politik Abu A'la A-Maududi.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem politik Islam Abu A'la Al-Maududi sistem politik modern.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap seorang yang ingin lebih dalam menelaah, mempelajari, akan ilmu pengetahuan, menegakkan kebenaran ilmu Allah terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya tentang fungsi sistem politik Islam dalam perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy.
2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Pemikiran Politik Islam selain itu untuk memenuhi tugas ahir dalam memperoleh gelar S1 dalam prodi pemikiran politik Islam Fakultas Ushulludin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian disini penulis memahami suatu permasalahan agar hasilnya optimal dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sebagaimana yang diharapkan maka dari itu perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan tugas penelitiannya agar dapat di pertanggung jawabkan hasil dari yang di teliti.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan atau mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari buku, serta karya-

⁷M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: tt., 1975), h. 2.

karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan, Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy.

2. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, pembahasan terhadap masalah yang diteliti dilakukan dengan menghimpun pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisannya untuk mendapat data yang diperlukan akan diambil dari berbagai Literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga dalam penelitian ini mendapat data–data yang benar (*Valid*) yang sesuai dengan kajian Skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Selanjutnya peneliti mengklasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan objek formal penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data skunder karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama adalah buku-buku, jurnal dan lain-lain. Dalam .⁸ Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber penelitian:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah literatur diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu karya-karya Abul A'la Al-Maududi. Sebagai berikut:

1. Khilafah Dan Kerajaan

⁸ Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Jogyakarta: Paradigm, 2005), h. 58

2. Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam

b. Data Sekunder

1. Dasar-dasar Ilmu Politik (Mariam Budiharjo)
2. Pengantar Ilmu Politik
3. Memahami Ilmu Politik (Ramlan subakti)
4. Pemikiran politik perpektif Abul A'la Al-Maududi (Arsyad Sobby)
5. Al-Qur'an Adalah Filsafat (Inu Kencana Syafiie) dan lain-lain.

Data sekunder adalah suatu referensi-referensi yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul yang diambil peneliti.⁹ Untuk melengkapi data-data yang sulit didapati, maka data yang sudah diperoleh akan di lengkapi oleh literatur- literatur yang menuliskan tentang tokoh ini kemudian mengklasifikasikan tulisan-tulisan tersebut yang ada Relevansinya dengan Judul yang akan dibahas oleh peneliti.

4. Metode analisa Data

Metode adalah berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, yang dibahas secara rinci mencakup langkah-langkah penelitian. Selain dari itu suatu penelitian harus di tuju pada metode dan harus diterapkanpula metode analisa data, yaitu penerapan metode pada saat pengumpulan data dan setelah terkumpul data. Dalam menganalisa data , peneliti menggunakan beberapa macam metode-metode analisa agar mudah di mengerti serta fahami diantaranya:

⁹ .Chailid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian, Cet-I*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 43

a. Metode Holistika

Tinjauan secara mendalam untuk mencapai kebenaran secara utuh. Objek dilihat interaksi dengan seluruh kenyataan. Dan identitas objek akan terlihat bila ada kolerasi dan koamunikasi dengan lingkungannya.¹⁰ Objek hanya dapat dipahami dan dimegerti dengan mengamati seluruh kenyataan dalam hubungannya dengan manusia dan manusia sendiri dalam segala macam yang mencakup hubungan aksi-reaksi sesuai dengan tema zaman. Pandangan menyeluruh ini juga disebut totalitas, semua dipandang dengan kesinambungan dalam satu totalitas. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode tersebut untuk menganalisis istilah-istilah yang digunakan dan muatan yang terdapat didalam data. Sehingga makna yang terdapat didalam data tersebut mudah dipahami dan didapatkan informasi yang akurat.

b. Interpretasi

Metode ini adalah karya pemikiran tokoh agar peneliti mudah dalam di memahami, serta hayati untuk menangkap makna dan nuansa yang dimaksud oleh tokoh secara khas. Pada aplikasi hakikat dalam penelitian karya Abul A'la Al-Maududi agar dengan mudah ditelaah dan dipahami secara mendalam, komprehensif dan holistik, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemikiran yang khas terutama pada Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy.¹¹

¹⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian filsafat*, (Grafindo Persada Jakarta, 1997), h. 45

¹¹ Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 63

5. Metode penyimpulan

Untuk memperoleh Suatu kesimpulan yang akurat terutama dalam Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududy maka peneliti menggunakan alur pemikiran lingkaran hermeneutis yakni suatu pola pemahaman dari hal induksi dan deduksi tidak dapat dikatakan mana yang terjadi lebih dahulu, yang individual dari semula dipahami dengan dilatarbelakangi oleh yang umum seakan-akan yang umum telah diketahui sebelumnya.¹² Maka antara induksi dan deduksi ada terdapat suatu lingkaran hermeneutis dari umum ke khusus dan seterusnya.

H. Tinjauan Pustaka

Rujukan pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Abu Al- A'la Al-Maududy mengeluarkan statment disamping penegakan hukum agama juga mengemukakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan secara komprehensif yang diuraikan Munawir Sjadzali dalam bukunya yang berjudul Islam dan tata negara : ajaran, sejarah dan pemikiran.
2. Abu Al- A'la Al-Maududy dalam pemikiran lain mengemukakan bahwa *“Kedudukan Kepala Negara Dalam Perspektif Abul A'la Al-Maududi”* oleh Muhammad Silohan Jaya Fakultas Ushuluddin Lampung skripsi tersebut mengulas tentang kedudukan yang sebenarnya terhadap kepala negara dalam perspektif Abu Al- A'la Al-Maududy

¹² 23 Anton Bakker dan Achmad Chams Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, kanasius, (Yogyakarta 1990), h. 45

3. Imam Yudhi Prasetya Dalam *Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*. Pasca reformasi gairah perpolitikan di Indonesia mulai berkembang lagi, partai politik yang dulu tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa mulai saat itu mulai menampakkan kekuatannya sebagai pengontrol jalannya kekuasaan. Sebenarnya gairah seperti ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Euforia kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala identitasnya. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu pertama merupakan pemilu yang paling demokratis, dengan banyaknya peserta pemilu dan asas jujur yang relatif bisa dipertanggung jawabkan karena penguasa belum mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi jalannya pesta demokrasi dan hal seperti ini yang pada saat sekarang menjadi persoalan tersendiri dimana penguasa masih dapat mempengaruhi proses pemilu, baik melalui mobilisasi pemilih untuk memilih partai penguasa, politik uang, permainan data pemilih dan juga permainan dari penyelenggara pemilu sendiri dalam memenangkan kandidat (Pemilu Legislatif) tertentu. Saat pemilu pertama pada tahun 1955 diikuti oleh 172 partai politik, hal ini menunjukkan bagaimana euforia kebebasan berpolitik benar-benar terjadi setelah lamanya terbelenggu oleh penjajahan..¹³
4. Abu Al- A'la Al-Maududy dalam pemikiran lain mengemukakan bahwa
“syura dan demokrasi menurut abu a'la al-maududi serta aplikasinya

¹³Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 201130

dalam politik modern” oleh Wiyadi Fakultas Ushuluddin skripsi tersebut mengulas prinsip dasar yang menjadi pondasi pemikiran al-maududi tentang konsep syura dan demokrasi Islam dan merelevansikan dalam politik modern.

5. Dalam buku yang berjudul “Khalifah dan Kerajaan” menerangkan bahwa khalifah disetarakan dengan pemimpin yang bernotabenekan keIslaman, sedangkan kerajaan disetarakan kekuasaan wilayah yang merangkap sebagai penguasa.¹⁴
6. pelaksanaan demokrasi pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Indonesia berdasarkan konstitusi. Dari penjelasan demokrasi pancasila diatas menunjukkan pemerintahan yang berdasarkan rakyat.Namun, berbeda dengan pemikiran Al-Maududi yang menganggap demokrasi tidak seutuhnya di tangan rakyat. Demokrasi yang dimaksud Al-Maududi adalah demokrasi Ketuhanan atau Teo-Demokrasi¹⁵
7. Baihaqi, dalam Jurnal Hukum Dan Tata Negara Perspektif Abu A’la Al-Maududi ia mengatakan Abu A’la al-Maududi merupakan salah seorang ulama Pakistan yang hidup di abad ke-20 dan penggagas Jama’at al-Islami (Partai Islam). Maududi merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu al-A’la alMaududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid

¹⁴ Abu A’la Al-Maududi, Al-Khilafah wal Mulk, Muhammad Al-Bafir, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung:Alfabeta, 1998), h.30

¹⁵Muhammad Choiri, SKRIPSI, *Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al –Maududi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM JURUSAN SIYASAH TAHUN 2016-2017.h.56

Qutb di Mesir yaitu Jamaah al-Ikhwan al-Muslimun. Sebagaimana Sayyid Qutb, Maududi merupakan tokoh perjuangan Islam seluruh dunia. Maududi, lahir pada 3 Rajab 1321 H bertepatan 25 September 1903 M di Aurangabad, India Tengah dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York Amerika Serikat.¹ Beliau lahir dalam keluarga terpandang (keluarga tokoh Muslim India) dari Delhi. Keluarga ini keturunan wali sufi besar tarekat Chisti yang membantu menanamkan benih Islam di bumi India. Ia terkenal dengan konsistensi pemikirannya yang melihat Islam sebagai suatu sistem yang komprehensif sehingga ditemukan di dalamnya, antara lain sistem ekonomi Islam, politik Islam, dan sistem sosial Islam.¹⁶

8. Hafidz Cahya Adiputra, dalam Skripsi, *Analisis Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Politik Pemerintahan*, Ketiga, tidak ada satupun makhluk yang diberi status berdaulat yang dengan mudah memiliki kedaulatan tersebut dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Dari ketiga alasan tersebut dapat difahami bahwa manusia tidak berhak untuk berdaulat, siapapun yang dijadikan berdaulat, tidak mungkin mampu menggunakan kedaulatannya sebagaimana mestinya selain mengkorupny¹⁷

¹⁶ Baihaqi, *Hukum Dan Tata Negara Perspektif Abu A'la Al-Maududi*, Jurnal, Vol. I, No. 01, September 2013.h.24

¹⁷ Hafidz Cahya Adiputra, Skripsi, *Analisis Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Politik Pemerintahan*, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016

BAB II

TEORI UMUM POLITIK ISLAM

A. SISTEM POLITIK ISLAM

Era Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad yang silam (570-632 M), akan tetapi ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga kini. Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan hanya menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip filosofis, sains dan teknologi, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan politik. Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau melakoni sebagai praktisi, memimpin negara Madinah pada tahun 622 –632 M. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW ketika membangun pemerintahan yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan kekuasaan pada umumnya yang bercorak monarki absolut. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di zaman modern, pemerintahan Beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi para penulis sejarah politik.¹⁸

Tidak diperkenankan orang islam beribadah digereja, pure, dan tempat-tempat ibadah lain. Selain masjid, surau, mushola dan lain-lain, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kafirun 1-5 :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ (٥)

¹⁸M. Basir Syam, *Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*, KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.h.157-158

*(1). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2). aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3). dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4). dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5). dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah."*¹⁹

Dalam Islam juga diperbolehkan berpolitik untuk mengatur strategi kemenangan dalam pertempuran melawan penjajah pada saat merebut NKRI menjadi negara yang merdeka. Upaya kelompok Islam Politik untuk menegakkan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menperhadapkan kembali Islam vs Pancasila. Bagi kelompok Islam Politik, Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariah Islam di Indonesia. Pandangan ini bersumbu pada nalar kuantitatif bahwa Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam bagi pemeluknya – sebagaimana terangkum dalam “tujuh kata” pada Piagam Jakarta, adalah sebuah keniscayaan. Nalar ini tampak mengenyampingkan realitas empiris masyarakat Indonesia yang majemuk di mana koeksistensi agama, suku, ras dan golongan adalah sebuah fenomena yang hidup. Selain itu, di dalam tubuh umat Islam sendiri, nalar kuantitatif Islam Politik ini juga bersifat imparsial: mayoritas umat Islam (yang diwakili Muhammadiyah dan NU) bersetuju hidup di dalam payung Negara Pancasila.²⁰

Islam mengajarka kepada agama untuk memberikan petunjuk/hidayah, baik yang menyangkut ibadah rutinitas maupun sosial. Ataupun dalam politik Islam maupun ibadah sosial harus mengedepankan etika, moralitas, peradab/adab, berdasarkan nilai-nilai keimanan yang kuat, yang mengedepankan akhlak yang mulia dalam rangka

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung:CV.Diponegoro,2005.h.484

²⁰Andar Nubowo, *Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I No. 1 2015.H.62

mencapai kebersamaan, tidak memecah belah umat, baik umat Islam maupun non Islam. Persoalan di atas perlu diterapkan guna menjaga persatuan dan kesatuan umat baik dalam beribadah maupun sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, sejak mulai tampilnya institusi negara yang menggantikan model monarki yang terjadi di Eropa, berbagai bangsa di Eropa mulai menerapkan bentuk negara sebagai institusi politiknya.²¹

Seorang politikus dalam Islam sangat dibutuhkan untuk memberi manfaat kepada orang banyak dalam makna secara luas, sehingga bukan hanya untuk kebutuhan golongan saja, namun untuk kemaslahatan umat Islam disegala sisi, baik di bidang pemerintahan maupun kebangsaan yang meliputi ibadah baik secara vertikal (kepada Allah) maupun secara horizontal (kepada sesama umat manusia) yakni ibadah sosial sebagai alat pemersatu antar elit politik. Istilah ini muncul pertama kali di kalangan agama Kristen, di Amerika Serikat. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan dalam berbagai kamus dan encyclopedi pada masa akhir-akhir ini. Ia belum termuat dalam Kamus Besar Robert edisi 1966 dan Encyclopedia Universalis edisi 1968. Kamus Kecil Petite Larousse Encyclopedique memuatnya dalam edisinya tahun 1966 dengan pengertian yang sangat umum sekali, yaitu "Sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern".²²

1. Teori politik Islam

Iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam

²¹ Jaenudin, *Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Kontemporer Menurut Abul A'la Al-Maududi*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. I No. 1 2015.H.227

²² Dwi Ratnasari, *Fundamentalisme Islam*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Dakwah Stain Purwokerto Komunika ISSN: 1978-1261 Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 Pp.40-57.h.5

mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislatif serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorang pun yang akan diperkenankan memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorang pun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti ini.²³ Tidak seorang pun yang diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang sekehendak hatinya sendiri dan tidak seorang pun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti itu.²⁴

2. Tujuan Negara Islam

Tujuan negara Islam yang dapat dibentuk berdasarkan Al-Quran dan Al-sunnah juga telah diberikan tuhan. Umat Islam, sebagai bagian integral dari manusia secara general, mau atau tidak, pasti bersentuhan, baik secara pasif maupun aktif, dengan dunia politik dan pemerintahan karena keduanya merupakan bagian yang tak terhindarkan dari hidup dan kehidupan. Terlebih, tidak sedikit ayat alQuran yang menyinggung masalah ini meskipun pada tataran global dan interpretatif sehingga memunculkan ide-ide tentang politik dan pemerintahan yang beragam di kalangan intelektual muslim.²⁵

Agaknya telah menjadi jelas bagi siapa pun yang merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi bahwa tujuan negara yang dikonsepsikan oleh Al-Quran Suci tidaklah negatif, tetapi positif. Tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat hanya

²³*Ibid.*h.7

²⁴Sayyid Abul a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung:Penerbit Mizan,1993),h.157

²⁵Idri , *Sistem Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif ,Abu Al-A'la Al-Maudu*,Jurnal, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.h.95

untuk memeras untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara ini bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam Kitab Suci Al-Quran. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bila mana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan diijinkan.²⁶ Negara Islam itu universal dan menyeluruh.²⁷

Terbukti bahwa negara semacam ini tidaklah dapat membatasi ruang lingkup kegiatannya. Cakrawala kegiatan ini hidup berdampingan dengan keseluruhan kehidupan manusia. Negara ini berusaha meramu setiap sektor kehidupan dan kegiatan masyarakat sejalan dengan norma-norma moralnya dan program reformasi sosialnya.²⁸ Dalam negara semacam ini, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengklaim urusan-urusan kehidupannya sebagai bersifat pribadi dan rahasia. Ditinjau dari aspek ini, bisa jadi negara Islam mirip-mirip negara fasis dan komunis. Tetapi nanti kita akan mengetahui bahwa dibalik sifatnya yang serba mencakup, negara ini merupakan negara yang secara luas dan mendasar berbeda dengan negara-negara totaliter dan otoriter tersebut. Di bawah lindungan negara ini, kebebasan pribadi atau orang per orang tidaklah ditekan dan sama sekali tidak ada abu-abu kediktatoran. Negara ini mengajukan jalan tengah dan mengejawantahkan segala yang terbaik yang pernah dikembangkan masyarakat manusia. Peri-keseimbangan dan moderasi sempurna yang menandai sistem pemerintahan islam, dan pemisahan yang tegas antara yang benar dan yang salah dirumuskan sedemikian rupa sehingga sistem yang

²⁶ *Ibid*, h,166

²⁷ *Ibid*.h.96

²⁸ *Ibid*.h.175

begitu seimbang ini tidak akan mampu dibentuk oleh siapa pun kecuali Tuhan yang Maha kuasa dan Maha bijaksana.²⁹

Negara Islam adalah Negara Ideologis Dampak lebih konkret dari kedua tantangan internal dan eksternal tersebut termanifestasikan ke dalam problem pengembangan sistem ekonomi Islam. Di satu sisi umat Islam kekurangan ulama pakar syariah yang bergiat mengembangkan konsep-konsep ekonomi syariah tapi juga memahami ekonomi kontemporer. Di sisi lain ilmuwan Muslim kini kebanyakan telah diajari disiplin ilmu dan praktik ekonomi konvensional (baca: kapitalis) sehingga menolak syariah. Sementara itu praktik-praktik perbankan syariah, takaful, bursa syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak berdasarkan pada kajian ilmiah akademik dan metodologis di tingkat perguruan tinggi. Sebaliknya kajian ekonomi Islam di perguruan tinggi tidak berkembang sepesat praktik-praktik ekonomi perbankan.³⁰ Jadi untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam umat Islam terhadang oleh kondisi internal umat dan juga tantangan eksternalnya.³¹

Karakteristik lain negara islam adalah bahwa ia merupakan negara ideologis. Dari pengamatan yang cermat atas Al-Quran akan jelas bahwa negara islam ini berlandaskan suatu ideologi dan bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Negara merupakan instrumen reformasi dan harus berperan sebagai instrumen reformasi. Ketentuan dari negara islam inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi islam serta hukum Ilahi yang dijunjung tinggi oleh mereka. Penyelenggaraan suatu negara islam haruslah orang-orang yang seluruh kehidupannya dibaktikan untuk menaati dan menegakkan hukum ini, yang tidak hanya

²⁹Ahmad Sholikin, *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*, Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 194-203.h.196.

³⁰Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*, Jurnal TSAQAFAH, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430.h.2

³¹*Ibid*.h.3

setuju dengan program reformasinya dan sepenuhnya yakin atas program itu, melainkan juga sepenuhnya menghayati semangatnya serta memahami semua rinciannya.

Dalam kaitan ini, islam tidaklah mengakui sepenuhnya perbedaan geografis, bahasa maupun warna kulit. Islam menetengahkan aturan-aturan tuntunannya serta rancangan reformasinya kepada semua manusia. Sepanjang sejarah kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas.³² Di lihat dari sisi historis, permasalahan tentang hak-hak minoritas dalam Islam sebenarnya telah lama diperdebatkan oleh generasi pertama Islam. Zaid bin Ali (w. 122 H) dalam karya al-Majmu' al-Kabir sudah membahas masalah itu, dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya.³² Siapapun yang meyakini program initanpa mempedulikan rasanya, bangsa maupun negaranya dapat bergabung dengan masyarakat yang menyelenggarakan negara islam. Tetapi orang-orang yang tidak menerimanya tidaklah diberi hak istimewa untuk turut campur dalam pembentukan politik dasar negara ini. Mereka dapat tinggal dalam batas-batas negara itu sebagai warga non-muslim. Hak-hak khusus telah diberikan kepada mereka dalam hukum islam.³³ Kehidupan minoritas ini kekayaan dan kehormatannya akan sepenuhnya dilindungi dan jika dia mampu memberikan sumbangsih, sumbangsih ini akan dimanfaatkan sepenuhnya.³⁴ Tetapi dia tidak akan diperkenankan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pokok negara ideologis ini.

Negara Islam didasarkan pada ideologi tertentu dan hanya masyarakat yang meyakini

³²Havis Aravik, *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam1 (Minority Rights in the Context of Islam)*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), pp. 63-78,h.63

³³*Ibid.*h.64

³⁴Ida Noviant, *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jurnal, YINYANG, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008 pp.h.255-261

kebenaran ideologi semacam itulah yang diperkenankan untuk menahkodainya. Di sini juga kita mencatat beberapa kemiripannya dengan negara komunis. Tetapi, perlakuan yang diberikan oleh negara-negara komunis terhadap orang-orang yang menganut keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan keyakinan negara tidaklah dapat dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan oleh negara Islam bagi orang yang sama.³⁵

Tidak seperti negara komunis, Islam tidak memaksakan prinsip-prinsip sosialnya kepada pihak-pihak lain dengan cara kekerasan. Tidak pula merampas harta kekayaan mereka atau menciptakan suasana teror dengan pemancungan massal rakyat serta pengiriman mereka ke kamp-kamp konsentrasi di Siberia. Islam tidak berniat membasmi minoritasnya tetapi justru melindungi mereka dan memberi mereka dan memberi mereka kemerdekaan hidup sejalan dengan budaya mereka sendiri. Perlakuan ramah dan adil yang diberikan Islam kepada kaum non-Muslim dalam suatu negara Islam (*dzimmiy*) dan perbedaan tegas yang ditarik antara keadilan dan ketidakadilan serta antara yang benar dan yang salah, akan meyakinkan semua orang yang tidak berprasangka terhadap negara Islam: bahwa rasul-rasul diturunkan Tuhan untuk menunaikan tugasnya dengan cara yang sama sekali berbeda-suatu yang sangat berbeda dan secara diametris bertentangan dengan jalan para reformer palsu yang berkeliaran di mana-mana disetiap tahap sejarah.³⁶

3. Kekhalifahan dan Hakekat Demokrasi Dalam Politik Islam

(a) Suatu masyarakat yang didalamnya semua orang merupakan khalifah Tuhan dan merupakan peserta yang setara dalam kekhalfahan ini, tidak dapat

³⁵ *Ibid*, h.167

³⁶ Havis Aravik, *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam1 (Minority Rights in the Context of Islam)*, h.88

membiarkan adanya pembagi-bagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semuanya menikmati status dan kedudukan yang sama dalam masyarakat semacam itu. Kriteria superioritas dalam tatanan sosial ini adalah kemampuan pribadi dan karakteristiknya.³⁷ Inilah yang secara jelas dan berulang-ulang disabdakan Rasulullah SAW:

Tidak ada seorang pun yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan orang lainnya kecuali dari segi kesalehan dan ketakwaannya. Semua orang adalah keturunan Adam, dan adam di ciptakan dari tanah.

Seorang arab tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang non-Arab, dan seorang non-Arab tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang arab, seorang kulit putih juga tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang kilt hitam, seorang kulit hitang tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang kulit putih, kecuali dalam hal kesalehannya.

Setelah penaklukan Makkah, saat seluruh Jazariah Atabiah di bawah kekuasaan Negara Islam, Rasulullah SAW. Menyampaikan amanatnya kepada anggota-anggota sukunya dan orang-orang yang pada masa sebelum Islam menikmati kedudukan yang mirip dengan kedudukan kaum Brahmana di India, Beliau bersabda:

Wahay kaum Quraisy! Allah telah mencabut keangkuhan kalian di zaman jahiliyah dan kebanggaan akan nenek moyang. Hai manusia, kalian semua adalah keturunan Adam dan Adam di ciptakan dari tanah, jangan ada kebanggaan apa pun mengenai nenek moyang, tidak ada kelebihan kemuliaan dari seorang Arab atas non-Arab, atau

³⁷Muhammad Fakhry Ghafur, *Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya* Religion And Democracy : The Emergence Of The Power Of Political Islam In Tunisia, Egypt And Libya, Jurnal Penelitian Politik | Volume 11 No. 2 Desember 2014 | 85–100.h.97

dari seorang non-Arab dibandingkan dengan seorang Arab. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa.

(b) Dalam suatu masyarakat semacam ini, tidak ada seorang pun yang akan mengalami ketiadaan kemampuan hanya disebabkan oleh perbedaan kelahiran, status sosial, atau profesi yang dengan berbagai cara dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahiriahnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Setiap orang akan menikmati peluang kemajuan yang sama.

(c) Dalam masyarakat semacam ini, tidak ada ruang bagi kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu atas yang lainnya, karena setiap orang adalah khalifah Tuhan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang pun yang diberi hak istimewa untuk menjadi penguasa mutlak dengan merampas hak-hak asasi orang kebanyakan. Kedudukan seseorang yang terpilih untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraan tidak akan melampaui ketentuan ini sehingga semua muslim, atau tepatnya semua khalifah Tuhan, menyerahkan khalifahannya kepada pejabat itu demi penyelenggaraan pemerintahannya. Di satu pihak, dia akan bertanggung jawab kepada Allah, dan dilain pihak dia juga akan dimintai tanggung jawabnya oleh rekan-rekannya yang telah mendelegasikan kekhalifahannya kepada mereka. Jadi jika tiba-tiba dia mendaulat diri sebagai penguasa mutlak yang tidak bertanggung jawab, diktator, maka sebenarnya dia tengah berperan sebagai pemeran ketimbang seorang khalifah, karena kediktatoran merupakan penolakan atas kekhalifahan umum. Memang, pada masa pemerintahan Zainal Abidin Ben Ali, sistem Pemilu multipartai sudah

berlangsung di Tunisia, namun politik otoritarianisme tetap mencolok dalam setiap kebijakan rezim yang mendeskreditkan lawan politiknya.³⁸

Oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa Negara Islam merupakan negara yang menyeluruh dan melindungi segenab sektor kehidupan, tetapi kemenyeluruhan dan keuniversalan ini didasarkan pada keuniversalam Hukum Ilahi yang harus ditegakkan dan ditaati oleh semua orang dan para pemimpin Islam.³⁹ Tuntutan yang telah diberikan Tuhan atas setiap sektor kehidupan pastilah akan ditegakkan seutuhnya.⁴⁰ Tetapi, seorang pemimpin muslim tidak dapat memisahkan diri dari perintah-perintah ini serta menganut politik regimentasinya sendiri. Dia tidak dapat memaksa orang untuk menjadikan profesi tertentu sebagai penganut, atau tidak menjadikan profesi tertentu sebagai panutan, mempelajari atau tidak mempelajari seni (politik) khusus, menggunakan atau tidak menggunakan suatu ajaran tertentu, memakai atau tidak memakai pakaian tertentu, mendidik atau tidak mendidik anak mereka dengan cara tertentu.⁴¹ Kekuasaan yang telah dimiliki para diktator Rusia, Jerman dan Italia atau yang telah dikerahkan oleh Atatürk di Turki, tidak dianugerahkan Islam kepada Amir-nya. Di samping itu, masalah penting lainnya adalah bahwa dalam Islam setiap individu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Pertanggung jawaban pribadi ini sama sekali tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Oleh karenanya, seorang individu menikmati kemerdekaan penuh untuk memilih jalan mana yang sesuai dengan fitrahnya. Jika sang pemimpin mempengaruhinya, maka dia sendirilah

³⁸ Muhammad Fakhry Ghafur, *Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya* / *Religion And Democracy : The Emergence Of The Power Of Political Islam In Tunisia, Egypt And Libya*, Jurnal Penelitian Politik | Volume 11 No. 2 Desember 2014 | 85–100.h.86

³⁹ ³⁹ Havis Aravik, *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam* / *(Minority Rights in the Context of Islam)*, h.87

⁴⁰ *Ibid.* h.38-39

⁴¹ Ida Noviant, *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*,

yang akan dihukum Tuhan karena tiraninya ini. Inilah alasan-alasan mengapa tidak ada satu pun jejak regimentasi dalam hukum Rasulullah dan *Al-Khulafa Al-Rasyidun*.

(d) Dalam masyarakat semacam ini, setiap muslim yang telah mencapai cukup umur, laki-laki maupun wanita, diberi hak dikalangan mereka adalah penjelma dari kekhalifahan. Tuhan telah membuat kekhalifahan ini bersyarat, bukan atas norma kekayaan atau kemampuan tertentu, tetapi hanya atas iman dan kesalehan. Oleh karenanya, semua Muslim memiliki kebebasan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.⁴²

B. HUBUNGAN POLITIK ISLAM DENGAN ASPEK HUKUM DAN EKONOMI

1. Politik dan Hukum

Dalam dunia kontemporer dewasa ini, amat terasa sekali pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan tersebut perlu mendapat kontrol dan diberi arah yang tepat oleh hukum, pada akhirnya dapat memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia, terutama Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴³

Oleh karena itu dalam keberadaannya, di samping juga mencakup nilai-nilai akhlak, hukum islam juga senantiasa bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum islam yang terdiri dari : *Pertama*, menegakkan mashlahat (perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan). *Kedua*, menegakkan keadilan, *Ketiga*, tidak menyulitkan, *Keempat* menyedikitkan beban.

⁴² *Ibid.h.*

⁴³ Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Bandar Lampung: FU IAIN raden intan Lampung, 2015), h. 127

Dalam kondisi seperti ini, hukum memegang dua peranan penting. *Pertama*, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat mengatur perilaku sosial, disebut dengan istilah *social control*.

Hukum islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan kepada wahyu Illahi tidak terlepas dari dua peran diatas. Pada satu sisi, hukhm Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat dalam menciptakan suatu tatanan baru. Pada posisi ini atyran Illahi yang terdapat dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai kedilan mutlak, yang diwujudkan dalam kemaslahatan manusia di sunia dan di akhirat. Pada sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Pada posisi kedua ini hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat dalam metode ijtihad.⁴⁴

Dalam bidang hukum, umapamamya, Allah adalah hakim yang paling adil, dan tidak pernah berbuat tidak adil, Dia tidak berlaku zalim kepada manusia, manusia sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya. Pada hari akhir, Dia akan menegakkan neraca keadilan dan perbuatan yang sekecil apapun tidak akan luput dari perhitunganNya. Dia sangat cepat dalam perhitungan dan sangat pedih siksaNya. Dia sangat cepat memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kesemuanya itu selaras dengan ungkapan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya berikut:

Artinya: "*Sesungguhnya aku (berada) diatas hujjah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku13 sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang*

⁴⁴Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, h.321

kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik" (QS. Al-An'am/6:57)⁴⁵

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٥٨﴾

"Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya" (Q.S Yunus/10:109)⁴⁶

Antara hukum, amanah dan keadilan, menurut konsepsi al-Quran, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh yang memperoleh amanat, memang tidak bisa tidak, ia harus menegakkan hukum secara adil, umpamanya seorang hakim, di dalam menetapkan amar putusannya, ia benar-benar harus berlaku adil. Sebagai landasannya, ialah surat *al-Nisa'*, ayat 56 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. an-Nisa'/4:58)⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 107

⁴⁶ *Ibid*, h. 179

⁴⁷ Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, Bandar Lampung: FU IAIN raden intan Lampung, (2015), hal. 69.

Dari ayat ini, dapat dilihat maksud dan tujuan ayat, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya berlaku amanah di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan ditambah dan jangan dikurangi, karena ada maksud tertentu dibelakangnya. Demikian pula pada waktu menetapkan hukum (keputusan), hendaklah ditetapkan dengan adil, jangan ada pilih kasih dan timbang rasa. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. *Qul al-haqqa walau kana murram*. Katakanlah yang benar meskipun hal itu pahit.

Secara yuridis, dari kandungan ayat tersebut, bahwa menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya hukumannya adalah wajib, karena perintah Allah, berdosa bagi orang yang tidak amanah, umpamanya berdusta, dan menipu orang lain. Menetapkan hukum (memberi keputusan tentang hukum) terhadap sesama manusia hendaklah dengan adil, jika tidak, berarti menentang perintah Allah. Sebab berbuat adil dan amanah adalah pengajaran dari Allah yang wajib ditaati oleh setiap orang yang beriman. Manfaat atau mudarat pengajaran dari Allah akan jauh berbeda akibatnya jika dibandingkan dengan manfaat atau mudarat pengajaran dari sesama manusia. Sesungguhnya Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mematuhi perintah dan pengajaranNya. Ancaman Allah itu tersembunyi di dalam kata-kata: "Lagi Mendengar Lagi Maha Melihat" dalam arti, bahwa manusia tidak akan berbuat dusta/bohong kepada Allah.

Ketika kekhalifahan memasuki era kemampuan yang ditopang oleh stabilitas di bidang politik, hukum sangat diperlukan untuk mengatur, meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan antar negara, hukum ketatanegaraan atau administrasi pemerintahan, termasuk juga bidang peradilan. Oleh karena itu, maka berbicara soal hukum, sesungguhnya masih bicara dalam koridor etika sosial Islam. Terdorong oleh kebutuhan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka

dilakukanlah kodifikasi hadis yang di susul dengan lahirnya ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu tafsir yang menjadi landasan utama bagi penetapan hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, maka McDonald merupakan menggambarkan hukum Islam itu sebagai "The Science of all things, human and diven" (pengetahuan tentang segala hal, baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan).⁴⁸

Dalam wacana etika sosial Islam, kedudukan hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluk Islam. Bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya itu. Betapapun pentingnya kedudukan dan peran hukum Islam dalam sejarahnya, kini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat "pertahanan" dari kemusnahan. Berkas-berkas dan pengaruhnya memang tampak di sana-sini, namun terdapat proses yang mengharuskan penilaian ulang serta pengkajian yang mendalam kembali agar hukum islam itu tidak kehilangan relevansinyadengan kehidupan yang terus menerus berkembang. Munculnya imam-imam mazhab tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam. Bahkan karena tingkat toleransi antar mazhab itu begitu besar, hampir tidak dapat ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara maupun wilayah yang berbeda dari sebuah negara maupun wilayah yang berbeda dari sebuah negara Islam.

Oleh karena itulah dalam keberadaannya, di samping juga mencangkup nilai-nilai akhlak, hukum islam juga senantiasa bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam dsan hukum Barat. Hukum Islam berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, pertama hukum islam yang berlaku secara yuridis formal dan yang kedua hukum islam yang berlaku secara non formal. Dalam point yang terakhir ini hukum islam di

⁴⁸ Sidi Ritaudin, *Op.Cit.* h. 132

pandang sebagai sistem yang bersifat teoritis saja, walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal adalah (sebagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda yang dirangkum dalam istilah mu'amalah. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah hukum yang berkenaan dengan bidang mu'amalah dan adat (tradisi lokal) dan tidak menyentuh persoalan hukum yang berkaitan dengan ibadah.

Syari'ah dalam perspektif hukum, merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, mengandung lebih dari 6000 ayat dan sunah yang berfungsi untuk mengutamakan dan menjabarkan (hukum) yang terkandung dalam Al-Quran, serta menetapkan hukum yang belum terdapat di dalamnya mengandung aspek-aspek hukum yang harus dipatuhi manusia secara imperatif, untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan hidup mereka di dunia dan akhirat. Aspek-aspek hukum yang harus dipatuhi manusia tersebut selanjutnya disebut syari'ah.⁴⁹

Seiring dengan bergulirnya waktu, berkembanglah suatu filsafat yang membahas dan memperinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum, diantara tujuan-tujuan hukum atau intensi legislasi *maqasidal-syari'ah*, sebagai upaya untuk menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual dari sistem hukum Islam.

Substansi dan urat nadi kajian intensi legislasi (maqasid syari'ah) dalam konteks etika sosial adalah masalah (welfare, benefit and utility). Artinya, tujuan pokok dan utama pelambangan hukum dalam islam adalah untuk merealisasi kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai macam kesulitan dan

⁴⁹ *Ibid*, h. 134

kemudahan. Untuk itu, Allah SWT, dalam mentransformasikan hukum islam (dalam konteks syari'ah) kepada makhluknya mengandung maksud-maksud, motif-motif dan tujuan-tujuan sebagai sasaran akhir yang ingin dicapai, yang kesemuanya itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan makhluknya baik di dunia maupun diakhirat. Al-Syatibi mengembangkan konsep intensi legislasi dengan pijakan bahwa tujuan akhir pelambangan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan yang menjadi intensi legislasi bagi al-Syatibi adalah kemaslahatan yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang di tuntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualitasnya dalam pengertian yang mutlak. Tetapi dalam kesempatan lain juga mempertimbangkan berbagai pengertian lain, seperti proteksi terhadap kepentingan-kepentingan dan sebagai suatu sistem yang memiliki berbagai tingkatan. Secara hakiki konsepsi Al-syatibi tentang intensi legislasi diarahkan untuk memberikan garansi dan proteksi terhadap lima prinsip pokok dalam hukum Islam (al-usul al-khamsah), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Corak kepentingan sosial yang secara umum merupakan tujuan aturan hukum, menentukan pula warna opini sosial terhadap kebijaksanaan penerapan hukum pada masyarakat tertentu. Problemanya kepentingan sosial berbeda pada setiap bentuk masyarakat. Pada masyarakat sederhana, terpencil dan relatif bersifat homogen, konsepsi dalam "keadilan" relatif bersifat seragam. Keadaan tersebut akan berbeda dirasakan oleh masyarakat modern, masyarakat massa dan masyarakat berlapis yang menafsirkan "keadilan" relatif lebih subyektif. Artinya, suatu hal yang dianggap adil oleh suatu kelompok sosial, akan dianggap tidak adil oleh kelompok lainnya. Dalam hukum Islam, klaim keadilan didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam Islam sangat erat kaitannya. Seseorang tidak akan pernah

memiliki hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban tertentu, dan tidak ada orang yang memiliki kewajiban tanpa dapat menikmati hak.

Filosofi dasar dari Hukum Islam adalah pengendalian atas tindakan pribadi-pribadi. Oleh sebab itu, setiap orang bukan saja didorong untuk menuntut haknya, melainkan juga untuk menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya dibagi pada dua kategori, yakni hak dan kewajiban untuk Allah. Di dalamnya termasuk hak dan kewajiban publik atau kolektif yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Kedua, hak dan kewajiban individu yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi.⁵⁰

Setiap tindakan hukum pribadi, akan berdampak sosial yang tinggi pada masyarakat, semua perbuatan buruk seseorang tertentu akan berpengaruh buruk pada masyarakat, sedangkan semua perbuatan baiknya, juga akan memperoleh hasil yang konstruktif bagi masyarakat. Al-Quran pernah mengisyaratkan ini dengan ungkapan bahwa seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka seolah-olah ia telah membunuh semua manusia, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan individu mempunyai implikasi sosial yang besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, hukum Islam dengan elastisitasnya menunjukkan adaptasi yang intens terhadap perubahan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan, misalnya adaptasi al-Quran itu diturunkan. Al-Quran misalnya tidak menyebutkan keharaman meminum arak seketika di waktu ayat yang menyinggung tentang arak pertama kali diturunkan. Ayat pertama tentang arak ini mendeskripsikan kurma dan anggur yang bisa menjadi rizki dan juga bisa menjadi arak. Tahapan ini belum menunjukkan nuansa kehalalan dan keharaman, dosa dan pahala atau benar dan salah. Tahapan ini hanyalah sekedar

⁵⁰ *Ibid*, h. 136

deskripsi awal yang belum menunjukkan suatu nilai dari sebuah produk makanan dan minuman.

Ketika keadaan sosial arab sudah kondusif untuk menerima ayat itu, maka turunlah ayat yang menyebutkan perbedaan yang jelas tentang klasifikasi khamar. Khamar ditunjukkan dengan dua klasifikasi yakni dosa besar di satu sisi dan manfaat di sisi lainnya, dengan menyebut dosanya lebih banyak dari manfaatnya, namun belum secara eksplisit dilarang atau diharamkan oleh al-Quran.

Di saat pengendapan paham bahwa *mudlarat* khamar lebih banyak dari pada manfaatnya sudah merata dikalangan *sahabat*, barulah al-Quran melarang khamar secara eksplisit, tapi itu pun hanya dalam kondisi *alat*. Sebelum ayat ini turun, meminum arak masih menggejala di masyarakat arab, bahkan ketika mereka hendak *alat* pun mereka masih meminum arak. Hal ini menyebabkan mereka mabuk dan terkadang salah dalam membaca bacaan *alat*. Maka turunlah ayat yang melarang muslim untuk mendekati (tempat) *alat* ketika dalam keadaan mabuk. Pada tahapan terakhir, barulah khamar diharamkan secara total oleh Al-Quran. Pengharaman khamar ini di samakan dengan pengharaman judi, berhala dan sihir yang dalam perspektif al-Quran disebut *rijs* (keji) dan perbuatan *Syaithan*.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa ketertarikan antara etika sosial dengan hukum itu laksana dua sisi satu mata uang, sama-sama seiring sejalan dan setujuan, di satu sisi etika sosial ingin menegakkan kebaikan dan menjauhi keburukan dalam masyarakat, (*al-amru bilma'ruf wannahyu'anil munkar*), sementara disisi lain, hukum ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, jadi sama-sama membahas asas-asas syurgawi dan manusiawi. Karena substansi dari hukum itu sendiri, menurut Stone sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafi'i, adalah penyelidikan oleh para ahli

hukum tentang norma-norma, cita-cita, teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir. Dengan kata lain, hukum memang saling terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, dan untuk memahami kebermaknaan hukum dalam konteks etika sosial, ada adgium yang mengatakan bahwa etika itu bersifat abstrak, realisasinya adalah penegak hukum, apabila semua orang berbuat baik, maka hukum tidak diperlukan. Ditinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekuler, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh AlMaududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ganjil.” Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*souverenitas*) ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi dalam tatanan sistem politik modern pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵¹

Dalam Al-Quran kita lihat bahwa sajian tentang hukum porsinya jauh lebih baik banyak dari hal lainnya, karena al-Quran itu memang merupakan kumpulan aturan-aturan dasar bagi manusia untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi, konsep al-Quran tentang hukum senantiasa berkaitan dengan Yang Maha Hakim, dan mengkaitkan norma hukum dengan ranah *ghaibiyah* ini merupakan bagian dari akhlak. Ironisnya, banyak negara yang mempunyai penduduk mayoritas islam namun masih enggan atau belum menerapkan hukum Islam. Bahkan hingga kini ada beberapa hukum Islam yang masih dinilai kontroversi, terutama bagi beberapa negara sekuler, tetapi tetal bertahan sesuatu yang mewujudkan kebenaran.

Diantara hukum Islam yang dipandang kontroversial oleh sebagian negara sekuler dimaksud tersebut adalah: pertama hukuman mati, islam memberikan

⁵¹Baco Sarluf1 dan Usman Wally, *Theo-Demokrasi Dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi*, Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon.Vol,11 juni 2015.h.1

hukuman mati bagi kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Hukuman yang keras ini membuat para calon pembunuh diharapkan menjadi jera. Tetapi perlu dipertimbangkan juga dalam hal ini pengaruh dari hukuman yang keras tersebut, terhadap ketenangan masyarakat dan terhadap perlindungan jiwa sesama manusia. Dewasa ini di Indonesia, yang terjadi adalah berkembangnya rasa tidak aman, investor enggan menanamkan modal karena ketiadaan kepastian hukum, beberapa peristiwa pembunuhan yang direncanakan tidak di usut tuntas, seperti kasus pembunuhan wartawan dan Hakim Agung, kasus Marsinah dan sebagainya.⁵²

Kedua, hukum pencurian, sebagai telah diketahui bersama bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, hukuman semacam ini dianggap keras luar biasa, tetapi perlu dicatat bahwa kejahatan pencurian, kebanyakan dilakukan dengan kekerasan bahkan sering berakibat pembunuhan si korban. Dalam keadaan seperti tersebut, apabila hukum Islam yang menerapkan potong tangan bagi pencuri masih dianggap keras, apakah tangan si pencuri itu harus lebih disayangi daripada nyawa korban pencurian tersebut. Mengapa ada istilah "keluar masuk penjara" dalam kasus serupa, pada orang yang sama, tentu saja hukuman tersebut tidak sesuai, membuat dia bukannya jera tetapi justru ketagihan. Bayangkan saja, terutama pencuri-pencuri berdasi, berapa juga orang mati kelaparan akibat ulahnya melakukan penggelapan uang me-mark up belanja negara, korupsi dan lain sebagainya. Apakah lebih sayang kepada nyawa seseorang Lim Sio Liong dari pada jutaan rakyat jelata bangsa sendiri.

Ketiga, hukum perzinahan, akibat lemahnya hukuman perzinahan inilah para orang tua merasa resah dan khawatir terhadap putrinya, terutama bila hendak menyekolahkan ke kota-kota besar. Ironisnya lagi, justru prostitusi malah dilegalkan dengan membuka lokalisasi. Dengan hukuman rajam bagi pezinah,

⁵² *Ibid*, h. 139

membuat Islam berhasil mencegah kehancuran kehidupan keluarga dan kesimpangsiuran, untuk menentukan bapak dari anak-anak seorang ibu.

Di balik dari apa yang telah diuraikan di atas, agaknya cukup signifikan untuk meneropong atau menyoroti berbagai jenis kejahatan yang dilakukan manusia, mulai dari pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dapat merusak fisik dan jiwanya dimasa depan, sampai pada pembantaian ibu hamil yang jabang bayinya dikeluarkan dan dijadikan mainan sasaran tembak di Bosnia. Kasus korupsi tidak kunjung henti, pembunuhan dan berbagai jenis kejahatan lainnya terjadi di mana-mana dan merajalela, seperti disinyalir sebagai pelanggaran HAM.

Contoh lain di Amerika Serikat, yang mengaku menjunjung tinggi kebebasan individu, data statistik memperlihatkan bahwa setiap enam menit terjadi satu kali perkosaan, bahkan *National Victims Center* pada tahun 1990 mencatat bahwa satu dari delapan wanita Amerika Serikat adalah korban perkosaan. Jadi pelanggaran terhadap harkat dan martabat sosial tidak tercegah lagi, sehingga mendorong terjadinya berbagai jenis kejahatan yang lebih menyeramkan. Sedangkan dengan penerapan hukum Islam, kejadian seperti di atas tidak terjadi, dengan Al-Quran dan Hadis, HAM seharusnya memproklamkan. Menjadi kewajiban bagi para ahli hukum Islam untuk menegakkan kritik etika sosial dengan memberikan keterangan dan penjelasan kepada dunia. Oleh karena ketidaktahuan yang menyebabkan musuh-musuh Islam menyerang dan menjelek-jelekkan nama Islam dan kaum muslimin dan sistem masyarakat yang mengacu kepada etika sosial yang berlandaskan al-Quran dan hadis.

2. Politik dan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, etika sosial yang ditegakkan harus bersifat komprehensif dan holistik, oleh karenanya menjadi lebih rumit. Di samping banyak

terjadi penyelenggaraan, bidang ini berkaitan erat dengan hukum dan kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum, ekonomi suka "mempermainkan" hukum dan kekuasaan. Ekonomi berada dalam koridor hukum, sedang hukum dan kekuasaan diberlakukan untuk mengatur lintas ekonomi. Tujuannya untuk kesejahteraan bukan untuk menyengsarakan rakyat.

Menurut Din Syamsudin, watak keuniversalan Islam ini menuntut aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan (termasuk masalah-masalah sosial, kenegaraan, politik, ekonomi dan hukum).⁵³ Sementara, watak kemutlakan Islam membawa implikasi bahwa Islam adalah sistem nilai yang absah dan mengatasi sistem-sistem nilai yang lain yang dianggap absurd. Di sini signifikasi etika sosial dalam upaya mencari titik temu antara idealitas Islam (nilai-nilai al-Quran) dengan realitas empiris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat. Bahkan Fazlur Rahman menegaskan bahwa "dimanapun" Islam hadir akan memberikan sikap moral yang lebih baik lagi bagi manusia, karena memang Islam adalah jalan hidup yang lengkap. Ia merupakan sesuatu yang utuh yang menawarkan jalan keluar terhadap segala persoalan hidup, yang bermuara kepada akidah dan akhlak.

Ada pandangan yang agak filosofis, bahwa manusia itu tidak mungkin selalu benar. Karena itu, dalam konteks etika sosial, harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar. Dalam arti kata, jelas Fachy lebih lanjut,:

"Interaksi berbagai kalangan dalam proses politik haruslah merupakan pengejawantahan dari proyeksi teologis dan moralitas surat *Al-Ashr* yang menyerukan saling menyampaikan kebenaran (*Wa tawashaw bi al-haqq*), karena dalam kenyataan

⁵³ *Ibid*, h. 142

tidak seorang pun mampu merangkum kebenaran mutlak pada dirinya maka, dalam konteks keharusan menyampaikan kebenaran pada pihak lain...."

Moralitas surat Al-Ashr, sebagaimana telah dinyatakan Fachry, tidak saja relevan dengan kajian etika sosial melainkan juga sebagai *Moral Force* yang berlandaskan teologis. Nilai-nilai teologis seperti iman dalam surat ini sangat erat dengan pertaliannya dengan amal saleh sebagai tindakan empiris yang harus ditopang dengan etika sosial, yaitu berpesan tentang kebenaran dan berpesan dalam kesabaran. Selanjutnya surat Al-Ashr ini sangat padat dengan pelajaran berharga. Imam Syafi'i pernah mensinyalir bahwa "Seandainya manusia mau mengamalkan surat Al-Ashr ini, maka cukuplah satu surah sajaditurunkan oleh Allah kepadanya". Karena implikasinya amat dahsyat bagi perdamaian dan kemakmuran di bumi, di akhirat kelak pun mendapat kedamaian yang abadi di surga, sebab di dunia ia telah beriman dan beramal saleh.

Etika sosial Islam bersumber dari makna substantif untuk kepentingan manusia sebagai petunjuk (*Way of Life*) sebab al-Quran yang mencakup seluruh aspek moral kaum muslimin, kehidupan sosial keagamaan, tidak berisi teori-teori etika (ilmu) dalam arti buku, sekalipun ia membentuk keseluruhan etos islam. Oleh karena itu kajian ini menjadi signifikan karena hasil dari proses substansiasi (pemaknaan secara hakiki etika dan moralitas) memiliki peran besar bagi pengembangan etika sosial, yang digali dari sumbernya, al-Quran. Karena agama tidak sebatas masalah ritualistik dan moralitas dalam kerangka ketaatan individu kepada Tuhannya, tetapi perlu terlibat ke dalam proses transformasi sosial.

Adanya kesenjangan dan ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat, hal itu dilihat sebagai realitas sosial yang bertentangan dengan apa yang menjadi misi agama

itu sendiri, yaitu bahwa manusia mempunyai tugas di muka bumi sebagai pemakmurnya dengan jabatan sebagai khalifah. Dalam konteks Indonesia, umat Islam adalah yang paling tertimpa kesedihan, pasalnya adalah di dalam realitas empiris dan historis umat Islamlah yang dulu berjuang mati-matian berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, akan tetapi daerah-daerah kantong Islam ternyata paling tertinggal, paling miskin dan bodoh-bodoh. Ketimpangan sosial dan ekonomi tersebut akan tampak lebih jelas lagi jika melihat, bagaimana kaum minoritas warga keturunan, yang dalam kurun waktu tertentu pada era Orde Baru mendapat fasilitas bisnis, kini seperti tuan penjajah baru di negeri multi etnis ini.

Ironis memang, rakyat Indonesia menangis! Negeri yang pernah dijuluki zamrud khatulistiwa yang *gemah ripah loh jinawi*, kini tengah terpuruk di segala bidang. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, puluhan juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan dan belasan juta kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, sekalipun pemerintah telah berulang kali ganti, tetapi kestabilan politik belum juga kunjung terwujud. Untuk menjelaskan akar persoalan, mengapa krisis terjadi, paling tidak ada tiga perspektif yang dapat dipakai sebagai bahan analisis, yaitu pendapat Zaim (1999) yang dinukil oleh Yusanto berikut:

Pertama, dalam *perspektif teknis ekonomi* krisis itu terjadi oleh karena lemahnya fundamental ekonomi, hutang luar negeri yang luar biasa besar, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan sebagainya. Solusinya, meningkatkan ekspor, restrukturisasi hutang dan sebagainya. Kedua, dalam *perspektif politis*, krisis itu terjadi karena berkuasanya rezim yang korup dengan tatanannya yang tidak demokratis. Solusinya, melancarkan proses demokratisasi hingga pergantian rezim seperti yang sudah terjadi pada rezim Soeharto. Ketiga, dalam *perspektif filosofis radikal*, krisis tersebut terjadi bukan karena itu semua. Tapi lebih oleh karena sistem

yang dipakai, yakni kapitalisme liberal, yang memang sudah cacat sejak awal dan bersifat *self-destructive*.

Menurut hemat penulis, keterpurukan yang melanda Indonesia adalah disebabkan akumulasi dari ketiga-tiganya, yang jika ditelusuri bermuara pada kesalahan manusia. Manusia itu bodoh karena ia bodoh, dan manusia itu miskin karena ia miskin. Bagaimana mungkin seorang yang bodoh akan bisa merubah nasibnya jadi pintar, jika ia selalu jadi objek orang pintar, dan bagaimana mungkin orang yang miskin dapat jadi kaya, jika ia sendiri tidak punya modal usaha, sudah terlanjur jadi miskin, maka akan senantiasa miskin, hingga ajalnya menjemput. Dari kondisi seperti inilah maka muncul motivasi kritik terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya, maka *perspektif politis* merupakan faktor utama

Jika iradah politik para penguasa adalah untuk mensejahterakan manusia, memanusiakan manusia, sesuai dengan kapasitas tanggung jawab, maka pemimpinlah yang "salah urus" negara ini, untuk itu perlu diidentifikasi secara cermat dan radikal akar permasalahannya, kemudian dicarikan solusinya, sebagaimana telah ditawarkan oleh Zaim di atas, maka agaknya memang perlu dilakukan pembersihan rezim dari antek-antek koruptor. Kemudian menetapkan kebijakan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi kapitalis konglomerasi. Selanjutnya menegakkan syariat Islam sebagai jalan satu-satunya menyelesaikan problem kenegaraan.

Informasi al-Quran, yang diturunkan 15 abad yang lampau, cukup membuka mata, bahwa berbagai krisis yang melanda merupakan *fasad* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, yang serakah, korup, tamak, dan rakus, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 41: "*Telah*

nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia".

Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab *Syafwat al-Tafsir* menyatakan bahwa yang di maksud dengan *bi ma kasabat ayai al-nas* dalam ayat itu adalah "oleh karena kemaksoatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maksiat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa, dan setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan.

Setiap muslim, yang tahu akan ajaran agamanya, pasti tahu wewenang dan tanggung jawabnya, yaitu menyuruh kepada yang benar dan melarang yang munkar. Semua peristiwa yang menghantarkan bangsa Indonesia kepada keterpurukan adalah munkar. Semua kemunkaran yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah melanggar etika sosial.

Hampir seluruh pakar berbagai bidang ilmu berpendapat bahwa krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia dan berbagai negara Asia dewasa ini bermula dari krisis moral. Dengan kata lain, krisis moral merupakan awal dari segala krisis yang lain. Untuk itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana etika sosial Islam aspek ekonomi bisa dipahami, tentunya dengan memperhatikan prinsip ekonomi yang secara berulang-ulang ditekankan oleh al-Quran adalah alat produksi dan sumber daya alamiah yang mendukung kehidupan manusia telah disediakan oleh Tuhan. Dialah yang telah menciptakan berbagai benda itu sebagaimana adanya dan mengatur benda-benda tersebut untuk patuh terhadap hukum alam agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dialah pemberi izin kepada manusia untuk mengelola benda-benda itu dan Dia pulalah yang menyediakan semua itu untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Pembahasan yang menyangkut modal, dalam al-Quran adalah larangan membelanjakan harta secara *mubazir* (*al-Isra'/17 : 26-27*) dan menumpuk-numpuk harta (*at-Taubah/9:34*). Besi banyak digunakan untuk membuat barang modal, seperti mesin perindustrian dan juga untuk barang konsumsi yang tahan lama. Al-Quran mengingatkannya dengan memberikan nama surat ke-57 dengan *al-Hadid* yang berarti besi, dan dalam ayat 25 mengingatkan bahwa besi mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaatnya bagi manusia.

Mengenai jual beli sebagai transaksi yang dihalalkan, harus dengan suka sama suka, dan jangan ada penipuan, di ungkapkan Al-Quran dalam surat *Al-Baqarah /2 :275*; dan *an-Nisa'/4:29*; dan *al-Muthaffifin/83 : 1-3*. Riba diharamkan Allah jual-beli dihalalkanNya *al-Baqarah/2: 275-279*; *Ali Imran/3:130*. Dalam surah *al-Baqarah* sebelum membicarakan fasal itu, disebutkan pahala bersedekah. Ayat 24 menyebutkan: "mereka yang menyedekahkan hartanya siang dan malam, dengan diam-diam atau terang-terangan, akan diberi pahala oleh Allah".

Selanjutnya, ayat-ayat yang membicarakan soal riba: "Mereka yang memakan riba tidak ada bedanya dengan orang gila yang dimasuki syaitan. Karena itu mereka berkata, bahwa berniaga dan riba itu sama saja. Akan tetapi, Allah mengizinkan berniaga dan mengharamkan riba". Allah melarang (mengharamkan) riba, tetapi pahala bersedekah diperbanyakNya. Dan sebagai nasehat bagi orang yang beriman (*Surat Ali Imron/3:130*) diperingatkan juga kejahatan riba itu: "Janganlah engkau memakan riba yang berlipat ganda; dan takutlah engkau kepada Allah, supaya engkau beroleh bahagia".

Mengenai riba ini, Faud Mohd Fachruddin mengatakan, sebagai berikut:

Riba sifatnya semata-mata konsumtif. Ia dinamakan dari orang meminjam uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Karena sangat susahnyanya, ia meminjam dengan tiada mengindahkan beban yang dipikulnya. Asal ia dapat pinjaman, diterimanya bayaran bunga sampai puluhan dan ratusan persen jumlahnya setahun. Sekalipun ia tahu, bahwa pokok hutang serta bunganya yang begitu berat tidak akan terbayar olehnya dengan tiada menghabiskan hartanya kelak, ia mau juga, sebab sesak hidupnya tidak terkira. Tidak jarang terjadi, sawah ladang orang habis terjual dan tergadai untuk membayar bunga hutang yang tidak kunjung berakhir... Riba, semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang meminjam uang untuk keperluan kehidupannya sebentar itu, dengan tiada berpikir panjang tentang melaratnya dikemudian hari. Tidak pernah ribadapat dipungut dari orang yang meminjam uang buat membuka perusahaan...

Dari ilustrasi diatas, terlihat betapa peduli dan *concern*-nya Islam terhadap etika sosial. Jauh sebelum marak dan berkembangnya LSM-LSM yang mempunyai program mengentaskan kemiskinan seperti terlihat sekarang ini. Sebagai etika sosial, ternyata tidak sedikit yayasan dan LSM atau apapun namanya yang "mengatasnamakan" rakyat miskin, justru malah memperkeruh dan memperparah suasana, contohnya sekarang sudah menjadi rahasia umum, yaitu "Yayasan Raudlatul Jannah", yang menangani pembagian "Sembako" terkenal bologgatenya dengan melibatkan Akbar Tanjung. Begitu pula kasus-kasus penyaluran dan bantuan bencana alam, seperti: Gempa Liwa, Banjir Jakarta dan sebagainya.

Mengenai harta, menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Bustanuddin Agus, Al-Quran mengungkapkan bahwa segala yang ada di alam adalah milik Allah (*al-Baqarah/2:255 ; al-Maidah/5:120; dan Thaha/20:6*), pengakuan terhadap hak milik pribadi yang di dapatkan secara halal akan dipergunakan untuk hal-hal yang

halal pula (*al-Baqarah*/:274; *an-Nisa*/4:32; *an-Nahl*/16:71; *az-Zukhruf*/43:32; dan *at-Taghabun*/64:15), harta mempunyai fungsi sosial (*at-Taubah*/9:60; *al-Isra*/17:26; dan *adz-Dzariat*/51:19), manusia mempunyai sifat keluh kesah sewaktu miskin dan kikir sewaktu memperoleh harta (*al-Ma'arij*/70:19-25) ayat-ayat al-Quran memerintahkan untuk memperhatikan sifat manusia secara umum, seperti sifat cinta kepada wanita dan harta benda (*ali Imran*/3:14; *at-Takatsur*/102:1-2 dan *al-Humazah*/104:2-3).

Hal senada yang menganjurkan agar berusaha mencari nafkah, umpamanya soal perdagangan, disebutkan pada bagian lain dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa/4:29)⁵⁴

Dalam kandungan ayat diatas terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan oleh agama, dan bahwa Islam juga menempatkan prinsip kebebasan pada tempat yang begitu senetralnya guna mengejar tujuan keduniaab, umum serta merta

⁵⁴ Departemen Agama RI. *Op.Cit*, h. 65

dengan itu sekaligus juga mengharuskan umat Islam bekerja secara etis menurut norma-norma yang secara garis besar telah disurutkan dan disiratkan di dalam al-Quran dan Hadis.

Dengan demikian, ada hubungan fungsional antara sistem nilai etika dengan etos kerja umat beragama. Terlepas dari kontroversi teori Max Weber mengenai hal tersebut. Agaknya dapat disebutkan bahwa ketakwaan serta kesalehan dalam menganut ajaran Islam secara *kaffah* dalam kondisi tertentu akan mendinamiskan dan memacu serta mengagresifkan pemeluk Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan secara konsisten dan sistematis. Mengenai teori Weber dan Yahya Muhaimin dijelaskan: Menurut kerangka pemikiran Weber, motivasi kegiatan ekonomi sering terdapat pada kelompok tertentu pemeluk sesuatu agama, yakni bersumber pada keyakinan pemeluk tersebut bahwa kehidupan mereka telah ditentukan oleh takdir Allah kepada orang-orang yang terpilih. Karena mereka, tidak mengetahui apakah mereka termasuk orang yang terpilih, demikian jalan pemikiran itu selanjutnya, maka kehidupan mereka di dunia senantiasa dikurangi oleh rasa ketidakpastian yang terus menerus. Namun adalah kewajiban mereka, kata Weber, untuk beranggapan sebagai orang-orang terpilih, dan menyingkirkan keraguan. Untuk memupuk kepercayaan itulah maka orang harus bekerja keras. Inilah yang disebutkan dengan *Innerworldly ascecticism* yakni kesungguhan berbakti kepada Allah yang mewujudkan dengan kerja keras.⁵⁵

Menanggapi teori *Innerworldly ascecticism* di atas, agaknya dalam kerangka doktrin Islam, bukan terletak pada panggilan untuk menjadi manusia terpilih, namun terletak pada kemutlakan Islam pada setiap Muslim untuk melaksanakan kewajiban

⁵⁵Muhammad Fakhry Ghafur, *Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya* Religion And Democracy : The Emergence Of The Power Of Political Islam In Tunisia, Egypt And Libya, h.89

pada segi ibadah dan segi mu'amalah secara simultan, dan bahwa hanya kepada mereka yang bekerja akan diberikan imbalan keduniaannya (مما كسبوا لهم نصيب)

Di dalam kerangka nilai islam, maka konsep takdir, seperti dimaksudkan oleh Weber di atas, di sebutkan bahwa Allah SWT, memang telah menetapkan suratan kepada setial manusia di kemudian hari, namun suratan takdir itu sendiri pada hakikatnya bergantung kepada usaha dan tingkah laku manusia di dunia.

Sikap manusia dan jugaperilakunya dalam konteks ajaran Islam, dengan demikian, merupakan sesuatu yang memberikan dimensi tertentu akan suratan takdirnya. Oleh karenanya, kaum muslim dituntut untuk melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah* sehingga, meminjam istilah Harus Nasution, dapat merubah takdir dengan takdir.



BAB III

BIOGRAFI INTELEKTUAL ABU AL-A'LA AL MAUDUDY

A. Riwayat Hidup Abu Al-A'la Al Maududy

Abu A'la dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321, bertepatan dengan 25 September 1903, di Aurangabad, suatu kota terkenal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Audra Pradesh, India. Ayahnya yang lahir pada 1844, adalah seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran-ajaran agama islam.⁵⁶ Al-Maududi anak termuda dari ketiga putranya.

B. Riwayat Pendidikan Abu Al-A'la Al Maududy

Pendidikan awal al-Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah, yang kemudian diteruskannya di suatu sekolah lanjutan yang bernama Madrasah Fauqaniyah, yakni suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern barat dengan pendidikan islam tradisional. Ketika Abu A'la sedang belajar di perguruan tinggi Darul Ulum, Hydrabad, ayahnya sakit dan kemudian meninggal, setelah itu pendidikan Abul A'la berhenti secara formal. Akan tetapi dengan metode otodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajaran lnya diluar lembaga pendidikan formal. Pada awal 1920-an Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris di samping, tentunya, bahasa Urdu, bahasa ibunya.

Sebagian besar ilmu yang diperoleh Maududi dapat dikatakan didapat dari jerih payahnya ssndiri dengan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Sejak muda Maududi telah menyukai jurnalisme dan pernah

⁵⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung, Penerbit Mizan: 1996), h.

menjadi editor beberapa mass-media ketika usianya baru menginjak dua puluh tahun. Minatnya pada politik juga tumbuh pada usia sekitar dua puluhan itu. Pada usia muda inilah Maududi menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul *al-Jihad fil Islam*, suatu buku yang sangat cermat dan tajam mengenai hukum Islam dalam perang dan damai. Tidak kurang dari Sir Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar, tokoh terkenal gerakan *khilafah* dan kemerdekaan, memberikan pujian sangat tinggi pada buku tersebut

C. Karya-karya Abu Al-A'la Al Maududy

Pada dasawarsa 1930-an tulisan-tulisan Maududi "membanjiri" dan sebagian besar tulisannya mencoba memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi oleh kaum muslimin India, dan sudah tentu semuanya itu ditinjau dari sudut pandang Islam. Berbagai ideologi modern yang mulai menguasai cara berpikir sementara kaum muslimin diserang habis-habisan oleh Maududi sambil ditunjukkan kekosongan dan kesesatan ideologi-ideologi *man-made* tersebut. Nasionalisme yang mengarah pada *jingo-isme dan xenophobisme* tidak saja ditelanjangi oleh Maududi, tetapi juga dibongkar seluruh bahaya yang terkandung di dalamnya serta ditunjukkan ketidakserasian nasionalisme semacam itu dengan pandangan Islam.

Membaca gagasan-gagasan segar Maududi itu, Muhammad Iqbal kemudian membujumnya agar pindah dari Hyderabad dan tinggal di distrik Pothohar, suatu daerah di bagian timur Punjab. Di sana Maududi bekerja sama dengan Iqbal mendirikan suatu pusat riset yang dinamakan *Dar al-Islam* dengan maksud untuk mendidik sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya secara positif dalam berkhidmat pada Islam, terutama sekali untuk melakukan rekonstruksi syariat Islam. Pada awal 1940-an Maududi mendirikan suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu *Jamiatul Islami*. Gerakan *Jamiatul Islami* pimpinan Maududi pada

hakikatnya merupakan gerakan kader-kader Islam dan tidak pernah menjadi gerakan massa. Gerakan *Jamiatul Islami* ini disegani terutama karena para pemimpinnya dan anggota-anggotanya yang penuh integritas dan dedikasi terhadap Islam serta kenyataan bahwa sebagian besar mereka menjadi *muhsinin* dalam kaliber masing-masing.

Ketika Pakistan lahir pada tahun 1947, Maududi segera pindah ke Pakistan dan mulai memusatkan segala tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan suatu negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.⁵⁷ Untuk mencapai tujuan ini, untuk kesekian kalinya karangan-karangan Maududi "membanjir" menyoroti berbagai dimensi ajaran Islam, terutama sekali yang berhubungan masalah-masalah sosial dan politik. Resiko seorang pemikir dan pejuang seperti Maududi kiranya sudah jelas. Gagasan-gagasannya berkali-kali bertabrakan dengan beberapa kebijaksanaan pemerintahan Pakistan yang oleh Maududi dipandang sebagai meninggalkan cita-cita didirikannya Pakistan. Oleh karena itu menjadi bagi Maududi bukanlah tempat tinggal yang asing lagi. Tekad yang teguh membaja untuk mempertahankan pendiriannya benar-benar dikagumi, baik oleh teman maupun lawan perjuangannya.

Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan "subversif" yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun Maududi bukannya minta naik banding atau memohon pengampunan penguasa waktu itu. Dengan senang gembira ia memilih kematian daripada meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya. Ia mengatakan kepada anaknyadan sahabat-sahabatnya: "Jika ajal bagi saya telah datang, tidak seorangpun dapat mengelakkannya, akan tetapi bila ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya, walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri

⁵⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung, Penerbit Mizan: 1996), h.9

untuk dapat menggantung saya". Keteguhan Maududi ini justru menggoncangkan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.

Abul A'la al-Maududi sepanjang hayatnya telah mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat Islam dunia. Selama kehidupan perjuangannya yang berkisar sekitar 60 tahun, Maududi tidak pernah "pensiun" dari kegiatan-kegiatannya untuk menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat manusia modern yang dirundung kebingungan ideologis, filsafi, dan sosial-politik. Ratusan buku, pamflet, dan ribuan ceramah, semua didedikasikan untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang sudah terlalu lama tertindih oleh berbagai paham kehidupan dan ideologi asing yang telah lama bercokol di dunia Islam selama masa penjajahan Barat yang panjang. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Negara tersebut.⁵⁸

Dan jika kita berpindah dan melihat realita kontemporer kaum muslimin, kita akan melihat sebuah kenyataan yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan kondisi Islam pada masa-masa sebelumnya. Perbedaan ini terwujud sangat nyata dalam “kemenangan” kekuatan sekularisme dalam pentas kehidupan sehari-hari. Interaksi kaum muslimin sendiri pun sangat jauh berubah terhadap Islam. Setelah sebelumnya agama memiliki kekuatan yang nyaris sempurna terhadap perilaku individu dan masyarakat, kini hampir dapat dikatakan bahwa kekuatan peran agama nyaris tidak melewati batas individu saja kecuali jika ingin mengecualikan beberapa kalangan masyarakat Islam, seperti sebagian masyarakat yang ada di Jazirah Arab misalnya,

⁵⁸Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), h. 36.

yang itupun memiliki tingkat kepatuhan dan keterpengaruhan pada Islam yang tidak sama satu dengan yang lain.⁵⁹

Kecuali Iqbal, pemikir-pemikir Islam dari sub kontinen Indo-Pakistan menjadi kecil bila dihadapkan dengan Abul A'la al-Maududi. Pemikiran-pemikiran radikal Maududi dewasa ini telah langsung atau tidak langsung menggerakkan semangat kebangunan Islam di dunia Muslim. Bahkan tidak kurang dari Sayyid Qutb, seorang *musafir* modern sangat terkemuka dari *al-ikhwan*, menyediakan beberapa halaman dalam kitab tafsir *Fi Dzalalil Quran* untuk mengabadikan pendapat-pendapat dan *ijtihad* Maududi tentang jihad dengan sangat jelas. Pendapat-pendapat Maududi tentang jihad dapat kita baca dalam tafsir Qutb mengenai surat al-Anfal. Keluasan ilmu Maududi memang cukup mengagumkan. Perhatian pokok Maududi di bidang tafsir, hadis, hukum, filsafat dan sejarah tidak mengurangi produktifitas karya-karyanya di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lain sebagainya.

Abu Al- A'la Al-Maududi, sebagaimana halnya Muhammad Natsir dari Indonesia, juga menjadi salah seorang tokoh Rabithah al-'Alam al-Islami yang berpusat di Makkah. Ketika penulis kata pengantar ini berada di Amerika Serikat, di beberapa negara Eropa Barat dan di Timur Tengah, penulis sempat menyaksikan bagaimana gerakan-gerakan kalangan mahasiswa Islam di sana menjadikan Maududi sebagai salah seorang tokoh yang sangat dihormati karena wawasan-wawasan segarnya mengenai Islam dan mengenai tugas-tugas kaum muslimin di zaman modern. Tampaknya juga di Indonesia, para pelajar dan mahasiswa serta cendikia-cendikia yang ingin mendalami Islam pada umumnya mempelajari karya-karya Maududi yang dapat dibaca dalam berbagai bahasa.

⁵⁹ Abdullah Zawawi, *Politik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 .h..86